BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang disering dilakukan dalam masyarakat, transaksi jual beli dilakukan secara lisan atau tulisan atas dasar kesepakatan para pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara tukar-menukar, yaitu memberikan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga yang telah disepakati dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.²

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Dalam menentukan rukun jual beli, ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun jual beli adalah kerelaan (ridha/tara'dhi) kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur dari hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi tersebut yaitu ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi)³

² husen shaharah siddiq dan muhammad adh – dharir, *transaksi dan etika bisnis islam*, (jakarta : visi insani publishing, 2005), hlm. 14

³ nasrun haroen, *fiqh muamalah*, (jakarta : gaya media pratama, 2007), hlm. 114-115

Jual beli yang sah menurut jumhur ulama memenuhi rukun jual beli antara lain adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴ Setiap jual beli yang sah menurut *syara'* terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*) dan syarat-syarat lain yang merusak. Adapun pandangan mayoritas mazhab syafi'i menyarankan agar barang yang akan dijual-belikan harus terlihat terlebih dahulu secara kasat mata. Namun, ini merupakan bentuk ihtiyath (kehati-hatian) agar tidak terjadi penipuan.⁵

Gas di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan. Selain sebagai penghasil devisa utama, juga untuk memenuhi kebutuhan energi dalam Negeri. Gas dapat diproduksi dalam bentuk cair yaitu berupa *Liquid Natural Gas (LNG)*, *Liquid Petroleum Gases (LPG)*, dan gas kota.⁶ Pada tahun 2011 pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak dan belanja negara dalam mensubsidinya. Hal itu dilakukan melalui program konversi minyak tanah bersubsidi ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* 3 kg. Tujuan dari kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg ini ialah dalam rangka: melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, melakukan efisiensi anggaran pemerintah karena penggunaan gas elpiji lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil

⁴ *ibid.*, hlm. 115

⁵ ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah* (jakarta : amzah, 2017), hlm. 190

⁶ tkm indonesia, *makalah tentang gas LPG*, wordpress.com, 7 april 2016 <https://tkmindoxample.wordpress.com/2016/04/07/makalah-tentang-gas-LPG/> diakses pada 23 april 2025

dari pada subsidi minyak tanah, menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, serta efisien untuk 2 rumah tangga dan usaha mikro.⁷

Gas subsidi merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, ada oknum yang mengoplos (memindahkan) mengurangi isi gas elpiji 3kg (subsidi) ke tabung gas merek Bright (non-subsidi). Sehingga Gas Elpiji 3kg (subsidi) beratnya berkurang, dan dijual dengan harga pasaran.

Fenomena ini muncul akibat beberapa faktor, seperti tingginya permintaan gas subsidi, keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi agen, serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kehalalan praktik jual beli tersebut menurut hukum Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya kejelasan objek yang diperjualbelikan, harga yang wajar, serta keadilan antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli gas subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu kepada pihak non subsidi berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Dalam bidang muamalah, Allah SWT telah menetapkan pedoman umum yang menjadi landasan dalam bermuamalah, seperti memperbolehkan memperoleh

⁷ iswardono, *teori ekonomi mikro*. (jakarta: gunadarma, 2011), hlm. 20

rezeki melalui aktivitas perdagangan, melarang praktik riba, mencegah pemborosan harta, serta mendorong umat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam kehidupan manusia secara umum, praktik muamalah juga mengalami pergeseran. Saat ini, sebagian orang justru memanfaatkan aktivitas jual beli sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti melakukan tindakan *ghasab* atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Apapun bentuknya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang tidak dihalalkan dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang mengandung unsur yang tidak jelas, tidak halal, atau melanggar dan merampas hak kekayaan orang lain. Tentunya jika mengambil kemanfaatan bersama maka selain keuntungan duniawi dibalik itu juga akan terlaksana saling keridhaan dan itu merupakan salah satu kunci bermuamalah yang bisa membuat bisnis menjadi lebih bertahan lama dalam pengoperasiannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

⁸ departemen agama republik indonesia, al – qur’an dan terjemahannya, *syaamil al – qur’an*, (bandung : sigma, 2009), hlm. 83i

Meskipun gas LPG bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, secara hukum diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi, pada kenyataannya di lapangan sering kali justru dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mampu yang seharusnya tidak menjadi sasaran program subsidi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dan perilaku hukum masyarakat yang berkembang secara informal.

Saat ini, distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Indonesia masih dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, pada kenyataannya sekitar 75% anggaran subsidi LPG justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, LPG 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani.⁹

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua individu dalam masyarakat menjalankan perilakunya sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan, termasuk dalam hukum Islam. Selalu ada sebagian orang yang menyimpang dari ketentuan tersebut, salah satunya melalui tindakan *ghasab* yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Saat ini, praktik *ghasab* kerap dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan hal ini menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, bahkan di lingkungan umat Islam sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang, secara sadar atau tidak, pernah

⁹ Cantika Adinda Putri, Duh! Pemerintah Akui Subsidi LPG Saat Ini Tak Tepat Sasaran, CNBC Indonesia diakses pada 7 Juni 2025 pada laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211229122005-4-302928/duh-pemerintah-akui-subsidi-lpg-saat-ini-tak-tepat-sasaran>

melakukan perbuatan *ghasab*, baik dalam bentuk kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih yang tetap memakai gas LPG subsidi meskipun mereka tergolong orang mampu.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG SUBSIDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menentukan fokus penelitian terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah tujuan pada penelitian ini, fokus penelitian ini melakukan sebuah pembatasan masalah yang diperlukan agar penulis dapat dengan mudah melakukan penelitiannya dan tidak adanya pembahasan yang melebar atas fenomena yang diangkat. Maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli gas LPG subsidi di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap transaksi jual beli gas LPG subsidi di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti dapat menyusun sebuah tujuan penelitian sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli gas LPG subsidi di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli gas LPG subsidi perspektif sosiologi hukum islam di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal berikut:

1. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperluas dan memperkaya pemahaman, khususnya terkait dengan praktik jual beli gas campuran yang telah diselidiki dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau pembandingan dalam penelitian-penelitian mendatang.
2. Dalam konteks praktis, harapannya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan sumber informasi yang berguna dalam menganalisis praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat agar praktik jual beli gas dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerugian di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang ditulis oleh Agung Aji Saputra dari Iain Metro pada tahun 2020.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda dengan beras berkualitas pada umumnya. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama – sama meneliti tentang barang atau produk yang dicampur (oplosan). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti.
2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran yang ditulis oleh Saiful Mahdi dari UIN Ar-raniry Darussalam - Banda Aceh pada tahun 2021.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah jual beli madu campuran atau madu tidak asli tidak diperbolehkan karena ketidakjelasan terhadap keaslian madu yang diperjualbelikan, mengingat kualitas madu tersebut terdapat ketidakjelasan sehingga dikatakan *gharar* (ketidakpastian). Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama – sama meneliti tentang barang campuran (oplosan). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

¹⁰ saputra, agung aji. *praktik jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi syariah di pasar welit kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah*. diss. iain metro, 2020.

¹¹ mahdi, saiful. *tinjauan hukum islam terhadap jual beli madu campuran (studi pada pedagang pasar bereunuen kabupaten pidie)*. diss. uin ar-raniry, 2021.

3. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (studi kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung) yang ditulis oleh Amelia Beby Holan dari UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2023.¹² Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di pasar Gintung pedagang yang menjual daging sapi campuran hanya 3 kios, mereka mencampur daging sapi segar dengan daging sapi lama yang disimpan didalam lemari pendingin, dilakukan karena mengurangi kerugian dan menambah keuntungan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang jual beli barang campuran (oplosan). Sedangkan perbedaan terletak pada objek yang dibahas.
4. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) oleh Akbar S. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.¹³ Dalam penelitian tersebut menghasilkan mekanisme distribusi gas, solusi dari pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan gas LPG 3 kg dengan mengawasi agen dan pangkalan dan pelaksanaan perlindungan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas tentang penyalahgunaan gas LPG subsidi yang ada pada masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian oleh akbar fokus kepada perlindungan hukum konsumen terhadap kerusakan LPG dan

¹² amelia, beby holan. *tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran (studi kasus di pasar gintung tanjung karang kota bandar lampung)*. diss. uin raden intan lampung, 2023.

¹³ akbar s, akbar s. *perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas LPG 3 kg (analisis hukum ekonomi syariah)*. diss. iain parepare, 2022.

pendistribusian LPG 3 kg yang tidak sesuai sasaran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus membahas praktik jual beli gas campuran/oplosan yang dilakukan oleh agen di desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih.

5. Jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Mengenai Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi yang tidak sesuai aturan, yang ditulis oleh Karpolin Mentari Manik, Grace Henni Tampongangoy dan Revy Samuel MK, dalam Jurnal Lex Administratum, Jurnal Fakultas Hukum vol.13 no.2 tahun 2025.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam distribusi LPG 3 kilogram masih memiliki kelemahan, sehingga subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran kepada masyarakat yang seharusnya menerima. Karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta penegakan sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar, guna memastikan distribusi LPG berjalan secara adil dan merata. Di sisi lain, kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah juga menjadi permasalahan utama yang perlu ditangani. Kelangkaan ini kerap dipicu oleh praktik spekulatif dari pihak distributor atau pengecer yang dengan sengaja menahan pasokan demi mendorong kenaikan harga di pasar. Dampaknya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan LPG bersubsidi kesulitan memperoleh produk tersebut dengan harga yang terjangkau.

¹⁴ manik, karpolin mentari, grace h. tampongangoy, and revy s. korah. "tinjauan hukum mengenai keputusan menteri esdm no. 37. k/mg. 01/mem. m/2023 tentang penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi yang tidak sesuai aturan." *lex administratum* 13.2 (2025).